

**PENGARUH MASA KERJA, JABATAN, DAN JENJANG PENDIDIKAN  
TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH  
TENTANG PRIPSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH**

**Muhammad Arfan**

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

**Edi Faisal**

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

**ABSTRACT**

*The objective of this research is to examine and analyze the influence of servicing period, position, and education level toward the level of understanding of government officials about the principles of good government governance in the Government of Banda Aceh City. The research type used in this research is verificative research or hypothesis testing research.*

*Respondents in this study amounted to 82 respondents as the sample of the total population of 459 respondents, namely Banda Aceh City government officials who served as Eselon II and Eselon IV of the government services and boards in the Government of Banda Aceh City. Data used in this study are primary data obtained by conducting field research by distributing questionnaires to the respondents directly. All questionnaires can be returned by respondents.*

*Based on the descriptive analysis of the government officials, score of the level of understanding of government officials about the principles of good government governance is obtained by 79.76%. Based on the acquisition of this score can be said that the level of understanding of government officials about the principles of good government governance in the Government of Banda Aceh City is high. The independent variables in this study are presented in the form of dummy variables. Based on the results of hypothesis testing, it is showed that the servicing period and education level have influence toward the level of understanding of government officials about the principles of good governance in the Government of Banda Aceh City, while the position does not have influence toward the level of understanding of government officials about the principles of good governance in the Government of Banda Aceh City.*

**1. PENDAHULUAN**

Konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia muncul seiring dengan terjadinya krisis multi dimensi pada 1997-an, yang antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (*poor governance*). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya penegakan hukum, monopoli dalam kegiatan perekonomian, serta buruknya kualitas pelayanan publik. Pemerintah dianggap sebagai akar masalah bukannya pemecah masalah, sehingga peran

negara menjadi minimal dan memaksimalkan peran pasar dan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pandangan yang baru terhadap pemerintahan yaitu bergesernya konsep *government* ke *governance*. Menurut *United Kingdom Development Administration* (Bappenas, 2007) *Good Governance* dan *Good Government* tidak dibedakan, keduanya dianggap sama-sama merujuk aspek-aspek normatif pemerintahan yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi.

Wacana tata pemerintahan yang baik kemudian terus berkembang pasca reformasi 1998 seiring dengan pengimplementasian Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.

Reformasi dengan berbasiskan *good governance* untuk membangun Indonesia baru ternyata banyak sekali kendala dan batasan-batasan yang dimiliki terutama berada dalam aspek hukum baik penciptaan hukum maupun penegakan hukum itu sendiri. Sesuai dengan literatur *good governance*, perangkat hukum dan penegakan hukum adalah prasyarat terbangunnya suatu *good governance*. Dengan segala hambatan dan keterbatasan yang dimiliki, semangat untuk membangun Indonesia baru dengan berbasiskan *good governance* masih terus hidup hampir di segenap organisasi, apakah itu organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Dalam perspektif keuangan khususnya institusi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* kepada institusi pemerintah.

Perubahan total dalam proses dan struktur serta *content* penganggaran pemerintah-APBN dan APBD serta akuntansi merupakan 2 (dua) produk utama untuk membangun sistem organisasi yang berbasiskan *good governance*. Namun demikian, 2 (dua) produk reformasi keuangan ini akan tidak optimal jika tidak diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusianya untuk menerima dan mengimplementasikan produk reformasi keuangan tersebut. Di samping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh budaya organisasi yang kondusif, faktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu dibangun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem organisasi berbasiskan *good governance*. Dengan sistem pelaporan yang efektif maka pengelolaan sumber daya organisasi khususnya sumber daya ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka.

Masalah lain yang terjadi di lapangan karena penyelenggaraan pemerintah yang buruk (*poor governance*) antara lain (Effendi, 2007) adalah (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparat; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tujuh kelemahan yang menonjol menurut Effendi (2007) adalah : (1) lemahnya kehendak pemerintah atau *political will/government will*; (2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan, dan rencana tindak tidak jelas; (3) kurang memanfaatkan teknologi informasi (*e-government, e-procurement, information technology*) dalam pemberantasan KKN; (4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (*single identification/identity number*) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5) masih banyak duplikasi,

## JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2, No. 1. Januari 2009

Hal. 1-14

pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang-undangan (*ambivalen dan multi-interpreted*); (6) kelemahan dalam *criminal justice system* (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan *criminal policy* belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (*criminal justice system*), preventif (*prevention without punishment*), dan pencegahan dini (detektif); dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah basis dari berhasilnya otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kekuatan dan bersifat otonom tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa ditopang oleh penegakan prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsifitas, konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visioner (LAN, 2000: 7).

Hal ini diperkuat lagi dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab IV pasal 20 mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang merupakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Selanjutnya pada Bab X pasal 199 (6) berbunyi, "Dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat".

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta (Bappenas, 2002). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah

Penelitian ini merupakan replikasi dan ekstensi dari penelitian yang dilakukan oleh sekretariat pengembangan tata pemerintahan yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Bappenas (2002) yang berjudul "Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik". Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas mengambil populasi responden yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan penelitian kali ini difokuskan analisisnya hanya pada aparatur pemerintah Kota Banda Aceh. Jika penelitian terdahulu hanya bertujuan untuk mengetahui rata-rata tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka penelitian kali ini lebih diperluas pengujian dan analisisnya yaitu untuk mengetahui pengaruh masa kerja, jabatan, dan pendidikan terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah Kota Banda Aceh tentang prinsip – prinsip *good governance*.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip – prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip– prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh.

## **2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **Hubungan antara Masa Kerja dengan Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.**

Masa kerja seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dia terhadap profesi yang digelutinya. Makin lama seseorang bekerja maka pemahamannya akan semakin bagus dan meningkat terhadap profesinya, begitu juga dengan pemahama aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip *good Governanace*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2002) dapat diketahui bahwa, tingkat pemahaman aparatur pemerintah dengan masa kerja 8-16 tahun lebih tinggi dari pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang masa kerjanya < 8 tahun atau > 16 tahun untuk kategori tingkat pemahaman baik. Ini membuktikan bahwa masa kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.

#### **Hubungan antara Jabatan dengan Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.**

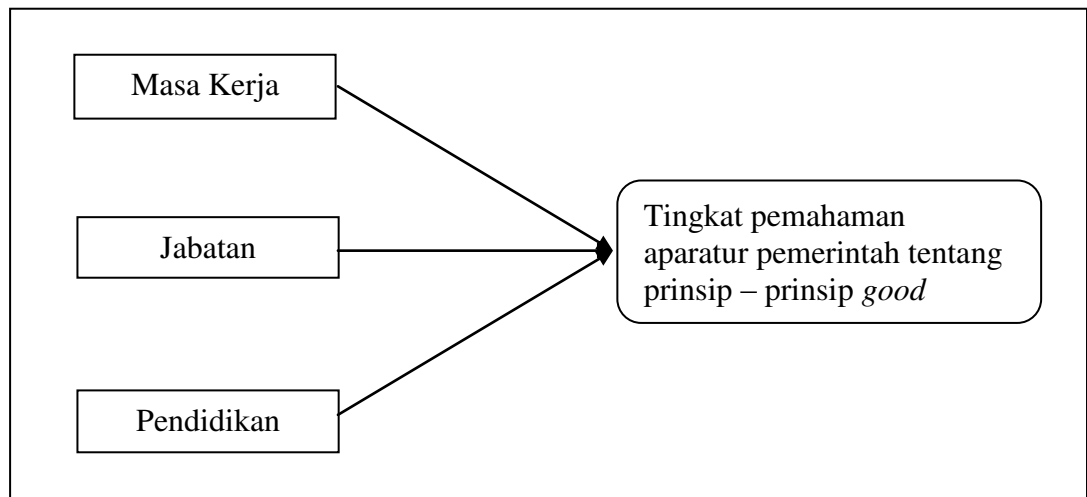
Jabatan aparatur pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governanace*. Makin tinggi jabatan aparatur pemerintah semakin besar pula tingkat pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *good governance*, ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2002). Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Jabatan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.

#### **Hubungan antara Jenjang Pendidikan dengan Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.**

Jenjang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahan aparatur pemerinhtah terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Umumnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2002), tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang sarjana lebih tinggi dari pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang berpendidikan SMU, dan tingkat pemahaman aparatur

pemerintah yang berpendidikan pasca sarjana lebih tinggi dari tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang berpendidikan sarjana. Ini membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.

Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

### **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masa kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Jabatan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Jenjang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah dengan golongan eselon II dan eselon IV yang bekerja di pemerintah kota Banda Aceh. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 459 aparatur pemerintah dalam 27 dinas dan badan di lingkungan pemerintah kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel minimal digunakan rumus Slovin (Umar, 2003:141), yaitu sebagai berikut :

# JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2, No. 1. Januari 2009

Hal. 1-14

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 10 %.

$$n = \frac{459}{1 + 459^2} = 82$$

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah sampel minimal adalah 82. Penentuan sampel minimal untuk masing-masing strata dihitung sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Diambil contoh untuk Sekretariat Daerah:

$$n_i = \frac{41}{459} \times 82 = 7$$

Daftar populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No.	Perangkat Daerah	Populasi (orang)	Sampel (orang)
1	Sekretariat Daerah	41	7
2	Sekretariat DPRD	10	2
3	Dinas Pendidikan	21	4
4	Dinas Kesehatan	24	4
5	Dinas Perhubungan	18	3
6	Dinas Tenaga Kerja Dan kependudukan	16	3
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16	3
8	Dinas PJSDA	18	3
9	Dinas Tata Kota	19	3
10	Dinas koperasi dan UKM	18	3
11	Dinas Perindag	20	4
12	Dinas P3K	20	4

## JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2, No. 1. Januari 2009

Hal. 1-14

13	Dinas syariat Islam dan KS	11	2
14	Dinas kebersihan dan Pertanaman	18	3
15	Dinas Pendapatan Daerah	22	4
16	Dinas Peperda	12	2
17	Dinas Pasar	16	3
18	Dinas Infokom Arsip dan PDE	20	4
19	BAPPEDA	21	4
20	BAWASDA	23	4
21	BPMKS	27	5
22	BAPEDALDA	11	2
23	Badan Limnas Kesbang	20	4
24	Kantor Pemadam Kebakaran	4	1
25	Kantor Diklat dan Perpustakaan	5	1
26	Kantor PTSP	4	1
27	RSUD Meuraxa	4	1
Jumlah		459	82

Sumber : Kantor Walikota Banda Aceh

### Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisisioner secara langsung kepada responden, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup sebanyak 28 pertanyaan atas 14 (empat belas) prinsip tata pemerintahan yang baik, yang diadopsi dari Sekretariat Pengembangan *Public Tata pemerintahanan yang baik* (Bappenas, 2002), serta pertanyaan-pertanyaan tentang masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

#### a. Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel terikat. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan.

#### b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mengukur tingkat

pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup mengenai suatu kasus umum dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang dikaitkan dengan 14 (empat belas) prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Bappenas, 2002), yaitu: (1) Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, (2) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka, (3) Tata pemerintahan yang cepat tanggap, (4) Tata pemerintahan yang akuntabel, (5) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, (6) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, (7) Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, (8) Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus (9) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, (10) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, (11) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, (12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan (13) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, dan (14) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup.

### **Metode Analisis Data**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan variabel bebas Dummy. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X + b_2D_1 + b_3D_2 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi

X = Masa kerja

$D_1$  = Jabatan

$D_1$  = 1 untuk penjabat eselon II

$D_1$  = 0 untuk penjabat eselon IV

$D_2$  = Pendidikan

$D_2$  = 1 untuk pendidikan pascasarjana

$D_2$  = 0 untuk pendidikan sarjana

e = Error

Untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak, perlu dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk menguji pengaruh variabel independen (masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan) terhadap variabel dependen (tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*) dilakukan dengan uji signifikansi. Kesimpulan diambil dari nilai signifikansi masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai signifikansi variabel independen (masa kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan) lebih kecil dari 0,05 yang dilihat dalam kolom sig. pada output SPSS, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila nilai sig. variabel independen lebih besar dari 0,05 maka koefisien regresi variabel tersebut bermakna nol (0) atau tidak bermakna, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, lama kerja, jabatan, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan jawaban tentang data responden maka diperoleh data tentang karakteristik responden sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Identitas Responden pada Pemerintah Kota Banda Aceh**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1.	Usia		
	26 - 30 Tahun	1	1,2
	30 - 35 Tahun	4	4,9
	36 - 40 Tahun	24	29,3
	> 40 Tahun	53	64,6
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>100</b>
2.	Jenis kelamin		
	Laki – laki	47	57,3
	Perempuan	35	42,7
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>100</b>
3.	Lama Bekerja		
	8 Tahun	3	3,7
	9 Tahun	6	7,3
	10 Tahun	9	11,0
	11 Tahun	4	4,9
	12 Tahun	3	3,7
	13 Tahun	1	1,2
	14 Tahun	6	7,3
	16 Tahun	3	3,7
	18 Tahun	3	3,7
	19 Tahun	1	1,2
	20 Tahun	2	2,4
	22 Tahun	2	2,4
	24 Tahun	3	3,7
	25 Tahun	5	6,1
	26 Tahun	5	6,1
	27 Tahun	4	4,9
	28 Tahun	6	7,3
	29 Tahun	4	4,9
	30 Tahun	3	3,7
32 Tahun	2	2,4	
33 Tahun	1	1,2	
34 Tahun	3	3,7	

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
	36 Tahun	2	2,4
	38 Tahun	1	1,2
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>100</b>
4.	Jabatan		
	Eselon IV	62	75,6
	Eselon II	20	24,4
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>100</b>
4.	Pendidikan		
	Sarjana (S1)	57	69,5
	Pascasarjana (S2)	25	30,5
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>100</b>

Sumber : Data primer diolah, 2008.

### Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Dalam uji penelitian ini, uji validitas item-item pernyataan dalam kuesioner dilakukan dengan jalan menghitung koefisien korelasi *product moment* dari tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total yang diperoleh. Koefisien korelasi masing-masing item kemudian dibandingkan dengan nilai kritis  $r$ , yang dapat dilihat pada tabel *product moment* yang tersedia sesuai dengan derajat kebebasannya dan signifikansinya. Pengujian validitas dilakukan pada 28 pernyataan dalam kuisisioner dengan tingkat signifikansi 5%. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13 for Windows.

Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan dari variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* dinyatakan valid, karena nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan di atas nilai kritis korelasi *product moment*. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua pernyataan memiliki nilai korelasi di atas nilai kritis 0,005 atau 5% yaitu 0,181.

Untuk menguji reliabilitas (kehandalan) peralatan kuesioner digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen yang reliabel jika memiliki nilai *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,50. Uji reliabilitas variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan.

### Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.

Skor yang diperoleh variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good govnanace* dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**

**Skor Variabel Tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance***

Skor	Total	Persentase Pencapaian
5	2410	20,99%
4	5432	47,32%
3	1212	10,56%
2	102	0,89%
1	1	0,01%
Total	9157	79,76%
Skor Maksimum (Jumlah item x 5 x 82)	11480	100 %
Kategori	Tinggi	

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* masuk dalam tingkat pencapaiannya tinggi dengan skor 9157 atau 79,76% dari skor maksimum. Skor yang diperoleh ini terletak pada tingkat pencapaian antara 60,0% sampai dengan 79,99%. Berdasarkan perolehan skor ini dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* adalah tinggi.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dianalisis dengan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai-nilai seperti pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Persamaan Regresi Linear Berganda				
$\hat{Y} = 3,636 + 0,014 X + 0,090 D_1 + 0,164 D_2 + e$				
Variabel	B	Beta	t <sub>Hit</sub>	Sig.
Konstanta	3,636		59,342	.000
Masa Kerja	,014	,438	4,575	.000
Jabatan	,090	,140	1,404	.164
Pendidikan	,164	,273	2,941	.004
R	= 0,651			
R <sup>2</sup>	= 0,424			
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,401			
t <sub>tabel</sub>	= 1,664			

Sumber : Hasil Penelitian, 2008.

**Pengaruh Masa Kerja terhadap Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Tentang Prinsip-prinsip *Good Governance***

Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien regresi pengaruh masa kerja ( $X_1$ ) terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* ( $Y$ ) diperoleh sebesar 0,014. Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel masa kerja ( $X_1$ ) adalah 0. Nilai koefisien regresi sebesar 0,014 menunjukkan bahwa koefisien regresi pengaruh masa kerja terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* tidak sama dengan nol ( $b_1 \neq 0$ ). Hasil penelitian ini menolak  $H_0$  (hipotesis nol) atau menerima  $H_a$  (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.

Nilai koefisien regresi masa kerja ( $X$ ) sebesar 0,014, bermakna bahwa jika masa kerja ( $X$ ) meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* akan meningkat sebesar 0,014, dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin lama masa kerja aparatur pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yakni masa kerja mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas sebelumnya pada tahun 2002.

#### **Pengaruh Jabatan terhadap Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Tentang Prinsip-prinsip *Good Governance***

Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien regresi pengaruh jabatan ( $D_1$ ) terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* ( $Y$ ) diperoleh sebesar 0,090. Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel jabatan ( $D_1$ ) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi pengaruh jabatan terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* sama dengan nol ( $b_2 = 0$ ). Hasil penelitian ini menolak  $H_a$  (hipotesis alternatif) atau menerima  $H_0$  (hipotesis nol). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jabatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini mengandung pengertian bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* tidak berbeda antara pejabat eselon II dan pejabat eselon IV. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni jabatan tidak mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas sebelumnya pada tahun 2002.

#### **Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Tentang Prinsip-prinsip *Good Governance***

Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien regresi pengaruh pendidikan ( $D_2$ ) terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* ( $Y$ ) diperoleh sebesar 0,164. Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel pendidikan ( $D_2$ ) adalah 0,004, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar

0,014 menunjukkan bahwa koefisien regresi pengaruh pendidikan terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* tidak sama dengan nol ( $b_3 \neq 0$ ). Hasil penelitian ini menolak  $H_0$  (hipotesis nol) atau menerima  $H_a$  (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.

Nilai koefisien regresi pendidikan ( $D_2$ ) sebesar 0,164, bermakna bahwa jika pendidikan ( $D_2$ ) aparatur pemerintah adalah pascasarjana atau  $D_2=1$ , maka nilai variabel tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* akan meningkat sebesar 0,164 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan aparatur pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yakni pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, bila aparatur pemerintah berpendidikan pascasarjana maka tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh akan meningkat sebesar 0,1614 satuan, dengan asumsi variabel masa kerja dan jabatan adalah konstan. hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas sebelumnya pada tahun 2002.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masa kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh.
2. Jabatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh.
3. Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan teori yang bersumberkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, sehingga akan menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Keadaan seperti ini adalah hal yang tidak dapat dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu masa kerja, pendidikan, dan jabatan. Diduga masih ada pengaruh faktor lain yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip *good governance* di pemerintah kota Banda Aceh seperti variabel jenis unit kerja, usia, dan lain-lain.

## JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2, No. 1. Januari 2009

Hal. 1-14

4. Penelitian ini hanya dilakukan di pemerintah kota Banda Aceh sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan pada kabupaten kota dan provinsi lainnya.

### Saran-Saran

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum mempertimbangkan seluruh variabel yang mungkin mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya diteliti kemungkinan pengaruh variabel-variabel lain terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*.
2. Diharapkan juga kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada pemerintah provinsi agar kesimpulan dari hasil penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2007. Beberapa Pemikiran Tentang Good Governance. [www.goodgovernance-bappenas.go.id/publikasi\\_files/buku\\_saku\\_files/beberapa\\_pemikiran\\_tentang.pdf](http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/publikasi_files/buku_saku_files/beberapa_pemikiran_tentang.pdf)
- Bappenas. 2002. "Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik". *Tim Kajian Sekretariat Pengembangan Public Good Governance-Bappenas*.
- Effendi, Taufiq. 2007. "Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance". *Sekretariat Negara Republik Indonesia*. [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=87&Itemid=54](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=54)
- LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. *Lembaga Administrasi Negara*.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.